

POTENSI PARADIPLOMASI DALAM MENDUKUNG KINERJA DIPLOMASI INDONESIA MENUJU KOMUNITAS ASEAN

Christy Damayanti

Abstract

Political reform and regional autonomy in Indonesia gives more space to the public for doing many foreign relations activities. Diplomacy as the brain of national power determines the success of international relations. Paradiplomacy as a form of democratization in national diplomacy, will strongly support the strategy of Indonesia's total diplomacy. Plan the establishment of an ASEAN Community by 2015 that provided space for public diplomacy really need of supported by paradiplomacy.

Key Words: *paradiplomacy, Indonesia Diplomacy, ASEAN Community.*

Pendahuluan

Demokratisasi yang penuh reformasi di Indonesia telah bergulir semenjak tahun 1998. Salah satu poin penting dalam proses reformasi politik ini adalah adanya desentralisasi kewenangan atau yang lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah dianggap dapat membawa pembaharuan dalam membawa praktek demokrasi yang lebih luas di aras lokal dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pilkada lokal. Otonomi Daerah di Indonesia diawali dengan adanya amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Amandemen ini mengubah sifat pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Salah satu bentuk desentralisasi adalah adanya mekanisme pemilihan kepada daerah yang berbeda antara Orde Baru dengan masa Reformasi. Dengan taju otonomi daerah pula, beberapa kewenangan yang semula dipegang pemerintah pusat pun diberikan kepada pemerintah daerah, yang dalam hal ini berarti propinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu kewenangan yang terdesentralisasi dalam kerangka otonomi daerah nampak dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang memberi peluang daerah untuk melakukan kerja sama internasional. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan dilengkapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 yang menyebutkan tentang tugas dan wewenang DPRD untuk mengawasi, memberikan pendapat dan pertimbangan serta menyetujui rencana kerjasama internasional yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian demokratisasi di Indonesia telah memasuki berbagai aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ranah diplomasi dan hubungan internasional.

Meningkatnya kewenangan daerah, dan di sisi yang lain arus informasi, pergerakan modal dan migrasi manusia bergerak secara kompleks lintas budaya, lintas Negara, lintas benua, menghadapkan daerah-daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota tidak akan mampu mengelakkan diri dari pengaruh internasional sekaligus berhadapan dengan berbagai kesempatan mendapatkan sesuatu yang positif bagi kepentingan daerah sekaligus kepentingan nasional. Dengan kapasitas ini mereka secara alamiah akan melakukan perluasan atas perannya. Aspek hubungan internasional oleh pemerintah daerah menjadi relevan diangkat manakala diperhatikan semakin menggemuknya isu – isu integrasi dan disintegrasi nasional maupun global.

Paradiplomasi Sebagai Sumber Kekuatan Nasional

Diplomasi adalah salah satu unsur kekuatan nasional. Dalam konsepnya tentang kekuatan nasional Morgenthau (1961) memasukkan unsure diplomasi sebagai unsure penting kekuatan nasional. Unsur-unsur kekuatan nasional bagi setiap bangsa menurutnya terdiri dari : kondisi geografis, sumberdaya alam, kemampuan industry, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas pemerintahan, dan kualitas diplomasi. Dikatakannya, dari segenap unsure kekuatan nasional di atas, yang terpenting, bagaimanapun kondisi tidak stabilnya suatu Negara, adalah kualitas diplomasi. Bila semua unsure yang lain digabungkan menjadi sebuah kekuatan besar, maka kualitas diplomasi yang menentukan bagaimana kekuatan itu dipadukan, dan memberikan daya guna secara nasional baik pada masa perang maupun damai (Morgenthau, 2010, hal. 169). Jika dibidang ekonomi strategi pemasaran menjadi penentu kehidupan produsen dan konsumen, maka dalam politik internasional kualitas diplomasi adalah otak kekuatan nasional.

Morgenthau merumuskan kualitas diplomasi sebagai perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri suatu Negara, dari tingkat pusat sampai daerah. Diplomasi adalah bagaimana kebijakan dan pelaksanaan dalam meramu semua unsur kekuatan nasional dan teknik memanfaatkannya sebagai alat mencapai kepentingan nasional. Dari konsepsi di atas, Morgenthau telah menganggap penting pelaksana diplomasi dimana tidak hanya pemerintah pusat yang mewakili kepentingan negara, namun telah memberi ruang untuk peran diplomasi pemerintah di daerah, atau diplomasi yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan local.

Paradiplomasi adalah merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi sub nasional, regional, local, (bukan pemerintah pusat), untuk kepentingannya. Dalam era globalisasi fenomena ini begitu

kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh actor non Negara dalam arena hubungan internasional. Daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama dengan pihak-pihak yang berada di luar batas yurisdiksi Negara. Konsep paradiplomasi pada awalnya dikemukakan Panavotis Soldatos dan dikembangkan Ivo Duchacek, kemudian menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah hubungan internasional oleh actor sub nasional. Fenomena diplomasi yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama (sister city, FDI, proyek bersama, pengiriman delegasi, dll) setelah muncul UU Otonomi Daerah, dapat dijelaskan dengan konsep para diplomasi di atas. Duchacek menjelaskan para diplomasi dalam tiga tipe (dalam Kurniawan Ariadi, 2009). Tipe pertama adalah *transborder paradiplomacy*. Menunjuk pada hubungan institusional, formal maupun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun berbatasan langsung secara geografis. Ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah. Tipe yang kedua adalah *transregional paradiplomacy* yaitu hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda negara dan tidak berbatasan langsung, namun Negara di mana kedua pemerintahan sub nasional tersebut berada berbatasan langsung dalam satu kawasan. Tipe yang ke tiga adalah *global paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia. Tiga bentuk para diplomasi ini sangat mungkin berkembang dan memberi kontribusi pada kinerja diplomasi Negara secara utuh.

Paradiplomasi sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah local dalam bidang hubungan luar negeri mutlak diperlukan seiring dengan diterimanya

paham diplomasi multijalur (multitrack diplomacy) sebagai tuntutan riil kehidupan hubungan internasional dalam iklim globalisasi dan demokrasi.

Kontribusi Paradiplomasi bagi Diplomasi Indonesia menuju ASEAN Community

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997 dan diperkuat dalam Bali Concord tahun 2003, Negara-negara ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015. Komunitas ini akan terdiri dari 3 pilar yaitu Komunitas Politik-Keamanan (ASEAN Political Security Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Indonesia sendiri menjadi penggagas pembentukan Komunitas Politik-Keamanan, selain berperan dalam perumusan dua komunitas lainnya. Kawasan Asia Tenggara bukanlah kawasan yang bebas dari kepentingan pihak-pihak di luar kawasan. Selain itu berbagai faktor heterogenitas negara di kawasan ini (baik dalam sejarahnya, kondisi politik, ekonomi, social) menumbuhkan interaksi yang kompleks kepentingan yang berbeda-beda. Permasalahan antar negara kawasan Asia Tenggara sendiri sangat kompleks karena untuk melangkah dari organisasi menuju komunitas diperlukan transformasi persepsi, sikap dan perilaku setiap komponen negara dan masyarakat. Dalam komunitas : Individu-individu yang terlibat dituntut punya tujuan, kepercayaan, sumberdaya, preferensi, kebutuhan yg sama, karena kontrak sosial tidak lagi dalam skala Negara namun skala regional. Dinamika regional maupun global menjadi hambatan sekaligus kebutuhan terwujudnya Komunitas ASEAN.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan “total diplomacy” sebagai strategi diplomasi nasional. Kebijakan ini mengadopsi secara luas keterlibatan public dalam aktifitas diplomasi multi jalur. Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun

2011 sangat memberi peluang optimalisasi diplomasi Indonesia dalam berperan memecahkan berbagai masalah yang ada baik di dalam negeri maupun di dalam kawasan Asia Tenggara. Di era sekarang ini diplomasi merupakan suatu cara, jalan, yang terbaik dalam menyelesaikan berbagai masalah. Diplomasi yang baik akan berhasil mengatasi isu sensitive bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tanpa merusak net working yang ada, bagaikan, “menarik seutas rambut di antara tepung”.

Paradiplomasi menjadi potensi yang sangat strategis bagi Indonesia dan Negara-negara anggota ASEAN jika dapat dikelola dengan baik, namun jika tidak, di tengah maraknya isu yang menekankan kepentingan daerah, hak daerah, dan kemampuan daerah dalam melakukan hubungan luar negeri dalam berbagai bentuknya paradiplomasi di sisi lain dapat menjadi faktor kontra produktif bagi kinerja diplomasi Indonesia.

Regionalisme di kawasan Asia Tenggara harus senantiasa dibangun dan dipelihara melalui ASEAN. Tanpa semangat regionalism, ASEAN tidak mungkin tumbuh menjadi komunitas, namun hanya sebuah kawasan dalam makna geografis. Bruce Russet (dalam Nuraeni, Deasy Silvy, & Arifin S, 2010, hal. 6) mengatakan bahwa regionalism harus dianalisa dan dibangun melalui ikatan social (*social cohesiveness*) berupa ikatan etnis, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah, dan kesadaran akan warisan bersama, *economic cohesiveness* (pola-pola perdagangan, kesaling tergantungan ekonomi, ikatan politik (*politic cohesiveness*) berupa tipe rejim, ideology, dsb, dan ikatan organisasional (*Organizational cohesiveness*) berupa keberadaan institusi regional secara formal.

Menurut konsepsi Bruce Russet di atas, sangat kecil kemungkinan ASEAN melangkah bersama dalam wadah komunitas, bila tanpa melibatkan daerah. Strategi diplomasi total yang ditetapkan pemerintah Indonesia yang berarti melibatkan seluruh

komponen bangsa di pusat dan daerah untuk mencapai kepentingan nasional secara implicit berarti mengakui peran strategis paradiplomasi. Selanjutnya meningkatkan peran paradiplomasi bagi penunjang kinerja diplomasi Indonesia dapat dilakukan pemerintah melalui (a) Menyiapkan regulasi yang kontributif bagi actor sub nasional (pemerintah daerah) untuk melakukan kerjasama dengan actor nasional maupun sub nasional, (b) menyiapkan sarana pemberdayaan dan advokasi kerjasama yang cukup (proses inisiasi, analisis, hingga praktek kerjasama) (c) melakukan komunikasi dan dialog yang intensif dan terbuka dengan pemerintah daerah dan komponen-komponennya, (d) mengelola system kebijakan pusat dan daerah yang menumbuhkan *self reinforcing* dari semua unit yang terlibat, (e) memperkecil gap antara politik luar negeri sebagai kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Jika semua ini dilakukan dengan suatu kesadaran bersama, maka Indonesia akan mampu mendorong proses *transnational regionalism* dalam ASEAN.

Paradiplomasi akan sangat kontributif bagi kepentingan nasional, bila dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat sebagai actor nasional dalam hubungan internasional. Namun seiring makin kaburnya batas antara isu daerah dan isu pusat, isu domestik dan isu internasional, sementara akses hubungan internasional sangat mudah tersedia bagi actor sub Negara, maka tidak mustahil aktifitas hubungan luar negeri oleh actor sub nasional ini berkembang mengarah *protodiplomacy*, yaitu diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang mengarah pada pencarian dukungan untuk kegiatan separatis.

Penutup

Pengakuan akan peran kontributif paradiplomasi bagi kinerja diplomasi nasional adalah konsekuensi dan komitmen yang harus diberikan pemerintah seiring dengan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan

diplomasi total yang member ruang yang luas bagi pemerintah daerah perlu ditumbuhkan bersama pemahaman dan kesadaran actor sub nasional di semua tataran akan peran strategis yang dapat dilakukannya. Penguatan kapasitas dan kabilitas paradiplomasi menuntut hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi dalam negeri sebagai factor determinan dalam proses kebijakan luar negeri, harus disadari untuk meningkatkan kesadaran actor diplomasi nasional dan sub nasional, akan tanggung jawab bersama.

Pengembangan potensi daerah harus disadari bukan sekedar kepentingan diplomasi actor di daerah, namun adalah masalah bersama bagi kinerja diplomasi nasional. Jika ini dapat terbentuk dengan baik, akan sangat kontributif bagi diplomasi Indonesia dalam mewujudkan Komunitas ASEAN pada 2015, dan lebih jauh lagi akan mampu mendukung Indonesia mengambil peran lebih sebagai kekuatan besar di kawasan Asia tenggara.

Daftar Pustaka

- Fawcett, Louise, & Hurrell, 1995, *Regionalism in World Politics*, Oxford University, United States
- Morgenthau, Hans J., 2010, *Politik Antarbangsa*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Nuraeni S, Deasy Silvy, & Sudirman, Arifin, 2010, *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pareira, Andre, 1999, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Stean, Jill, & Pettiford, Lloyd, 2009, *Hubungan Internasional, Perspektif dan Tema*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

TOTAL DIPLOMASI DAN PENCITRAAN INDONESIA

Herning Suryo

Abstract

Globalization era and the information revolution as a major phenomenon that continues to roll, has encouraged a change a fundamental change in the order and space in a country Indonesia is no exception, of these phenomena can not be avoided anymore that has occurred interdependence and interpenetration of power. Strength is moving through the national boundaries between their respective countries, this gives the sense that in this era will never have to live their own country. Indonesia as a nation will be able to benefit, while avoiding losses, if able to use the right to national interests

The spirit of the world to establish trust between the government and the international public in Indonesia should continue to have embarked, what a beautiful and formulated into a total of diplomacy, which in essence, the public holds an increasingly vital role in the diplomatic mission of a country especially in a situation that increasingly integrated with a variety of fields very varied Government jobs will be light if the process of shaping world public opinion in order to instill the image / image is totally supported by internal and the public as an effort to reach meaning world sympathy for the Indonesian national destination.

Keyword : Total Diplomacy, Image Building

Pendahuluan

Proses globalisasi dan revolusi informasi sebagai fenomena besar yang terus bergulir, telah mendorong perubahan-perubahan mendasar pada tatanan dan ruang pada sebuah negara tidak terkecuali Indonesia. Dampak yang paling kita rasakan dari proses globalisasi adalah semakin eratnya saling ketergantungan antar-negara dan antar-masalah. Sementara itu, revolusi informasi telah membuat dunia terasa semakin kecil, dengan lintas informasi yang semakin cepat, dalam jumlah besar, dan global jangkauannya. Manifestasinya sangat terasa dalam kehidupan keseharian kita, yaitu semakin menyempitnya jarak ruang dan jarak waktu. Kedua fenomena itu bukan saja menghadirkan banyak manfaat dan peluang, tetapi juga membawa potensi bencana.

Dari fenomena tersebut tidak dapat di hindarkan lagi bahwa telah terjadi interdependensi dan interpenetrasi berbagai kekuatan. Kekuatan tersebut bergerak menembus batas-batas nasional di antara negara masing-masing, hal ini memberikan

makna bahwa pada era ini tidak akan pernah ada negara yang hidup sendiri. Indonesia sebagai suatu bangsa akan dapat menarik manfaat, sekaligus menghindari kerugian, apabila mampu memanfaatkan dengan tepat untuk kepentingan nasionalnya. Tentu tidak mudah bagi Indonesia untuk bisa turut serta pada kancah interdependensi dengan negara lain jika Indonesia tidak mampu menjadi negara yang dapat di percaya oleh dunia internasional, sementara sangat di sadari bahwa akan banyak manfaatnya jika Indonesia dapat berperan aktif melakukan Hubungan Internasional.

Pencitraan positif suatu Negara dimata dunia akan sangat mempengaruhi sebuah Negara dalam hal eksistensinya secara internasional. Dengan citra yang baik mampu melancarkan aktifitas luar negerinya dengan mudah. Salah satu yang harus dipegang adalah konsistensi sebuah negara dalam melakukan komunikasi dengan negara lain sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan kepada negara tersebut.

Selama ini dalam melakukan komunikasinya dengan dunia internasional

,Indonesia selalu mengandalkan para diplomatnya, sehingga di butuhkan diplomat –diplomat yang handal untuk dapat menyampaikan pesan – pesan dari negaranya. Hubungan internasional pun sekarang tidak lagi dipandang sebagai hubungan antar negara namun juga meliputi hubungan antar masyarakat internasional. Oleh karena itu, diplomasi tradisional yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, tidak lagi efektif dalam menyampaikan pesan diplomasi kepada suatu negara. Oleh karena itu, aktivitas diplomasi publik yang melibatkan peran serta publik akan sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi aktivitas diplomasi tradisional. (Kikoo/2009)

Semangat untuk membentuk kepercayaan dunia international antara pemerintah dan publik Indonesia harus terus di lancarkan, apa yang kemudian dengan indah dirumuskan menjadi diplomasi total, yang intinya, publik memegang peranan yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terlebih pada situasi yang semakin terintegrasi dengan beragam bidangnya yang sangat variatif. Bagaimanapun juga, misi diplomasi tidak akan pernah berjalan dengan efektif tanpa keterlibatan publik. Oleh karena itu, setiap negara kini berlomba-lomba menjalankan diplomasi total (multi-track diplomacy) dengan meningkatkan peran publik dalam aktivitas diplomasinya dalam rangka melengkapi first track diplomacy .

Pekerjaan pemerintah akan menjadi ringan jika proses pembentukan opini publik dunia dalam rangka menanamkan citra/image di dukung secara total oleh publik internalnya dan di maknai sebagai upaya meraih simpati dunia untuk kepentingan nasional Indonesia.

Diplomasi total sebagai upaya pencitraan Indonesia di dunia International

Pada Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, Indonesia mencanangkan

kembali diplomasi total. Menurut Menlu Hasan Wirayuda, Diplomasi total ialah diplomasi yang melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi dan memandang substansi permasalahan secara integratif. Diplomasi tersebut dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah, swasta dengan swasta, NGO dengan NGO, masyarakat dengan masyarakat dan komponen bangsa lainnya atau kombinasinya. Dengan diplomasi total terdapat banyak langkah kreatif dan inovatif yang perlu dikembangkan oleh semua komponen bangsa. (Hasan Wirayuda/2009)

Alasan utama dari seruan diplomasi total ini didasarkan oleh asumsi yang sederhana; yaitu pemerintah yang tidak dapat mengatasi berbagai tantangan dalam isu-isu International dan diplomasi yang semakin kompleks terlebih lagi, sifat yang melekat dari pemerintah adalah sangat kaku. Melalui peningkatan aktivitas diplomasi yang menyertakan publik (Diplomasi Publik) , pemerintah berharap bahwa upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional. Disamping itu, pemerintah pun berharap bahwa keterlibatan publik ini dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah sekaligus dapat memberikan masukan dan cara pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah.

Konkritnya Diplomasi publik dapat di pahami sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui understanding, informing, and influencing foreign audiences. Dengan kata lain, jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme government to government relations, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada government to people atau bahkan people to people relations. Tujuannya adalah agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan

yang lebih luas. Tujuan lainnya dari diplomasi publik adalah mengurangi atau menyelesaikan konflik melalui pemahaman komunikasi dan saling pengertian serta mempererat jalinan hubungan antar aktor internasional; mengurangi ketegangan, kemarahan, ketakutan, dan salah persepsi; menambah pengalaman dalam berinteraksi; mempengaruhi pola pikir dan tindakan pemerintah dengan menjelaskan akar permasalahan, perasaan, kebutuhan, dan mengeksplorasi pilihan-pilihan diplomasi tanpa prasangka; dan terakhir adalah memberikan landasan bagi terselenggaranya negosiasi-negosiasi yang lebih formal serta merancang kebijakan pemerintah. (Kikoo/2009)

Tentang Citra

Citra atau image dapat di pahami melalui berbagai definisi, Oxford English Dictionary memberikan pengertian citra sebagai " *The general impression that a person organization or product present to the public* " Citra dapat di ibaratkan sebagai " *mental picture : impression ,a mental conception held in common by members of a group and being symbolic of a basic attitude and orientation toward something (as a person , class, racial type, political philosophy or nationality)*). Citra sesungguhnya adalah sebuah refleksi dari diri, jadi jika kondisi internal suatu negara itu buruk maka tidak dapat di hindari lagi pantulannya akan buruk pula. Dalam konsep pencitraan, manajemen yang harus di benahi pertama kali adalah diri sendiri atau internal negara tersebut.

Citra di peroleh melalui informasi dari berbagai sumber baik media cetak maupun media elektronika, kemajuan teknologi memungkinkan berbagai pihak dengan mudah dapat mengakses bermacam informasi, kemajuan teknologi pula yang kemudian membuat informasi-informasi tersebut tidak dapat terkontrol apakah informasi tersebut benar atau tidak ,baik atau buruk sehingga memunculkan citra yang

tidak terkontrol pula, untuk itu di perlukan diplomasi pencitraan (Vivi Feriany ,2009)

Konsep Diplomasi

Diplomasi mempunyai arti yang sangat luas dan mencakup berbagai kegiatan . Menurut kamus Terminologi Hukum International yang di terbitkan oleh Universitas Sorbonne di paris, diplomasi mempunyai banyak arti diantaranya secara luas adalah kepintaran, ketrampilan, kelihaihan dan kehati-hatian yang di anggap perlu bagi seorang pejabat dalam menangani masalah-masalah luar negeri ,Sir Ernest satow dalam bukunya "*Guide to Diplomacy Practice* " mengatakan bahwa diplomasi adalah : *The application of intelligence and tact to conduct official relations between the government of independent states* , satu lagi definisi diplomasi di sampaikan oleh Back ' Law Dictionary yang mengatakan " *The art and practice of conducting negotiations between foreign government for the attainment of mutually satisfactory political relations. Negotiation or intercourse between nations through their representative* "

Definisi tersebut, jelaslah bahwa diplomasi menyangkut aspek yang sangat luas, baik mengenai cara, kebijakan, orang, lembaga maupun profesi. Namun diplomasi ini pada umumnya merujuk pada seni, teknik dan cara bagaimana kita mengadakan pendekatan ataupun perundingan (negosiasi) untuk memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara dan langkah-langkah yang di ambil untuk mengamankan kepentingan tersebut, disamping membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan Negara-negara lain. (Prof .DR, Boer Mauna/2002)

Upaya pencitraan yang terus menerus di lakukan Indonesia tentu saja harus di dukung dengan situasi internal yang kondusif . Setidaknya ada tiga (3) citra utama yang pada saat ini menjadi fokus dunia international :

1. Citra sebagai negara demokratis. Francis Fukuyama dalam bukunya, *The End of History and the Last Man* (1992), meramalkan bahwa setelah ambuknya komunisme, dunia akan bicara dengan bahasa yang nyaris sama: demokrasi dan pasar. Citra sebagai negara demokratis dianggap sebagai aset politik dalam pelaksanaan diplomasi. Di tengah keraguan dunia bahwa Islam sulit menerima demokrasi, justru Indonesia memberi bukti dengan penyelenggaraan pemilu demokratis. Dengan bukti ini, dunia percaya, sebenarnya Islam dan demokrasi tak perlu dipertentangkan, malah saling mengisi.
2. Citra Indonesia sebagai negara mayoritas muslim moderat. Sentimen politik internasional pasca-tragedi Menara Kembar di New York telah mengerek wacana Islam ke puncak agenda global. Ketika Barat menuduh dan Islam menjawab dengan radikalisme, diplomasi Indonesia tampil dengan sikap moderat. Moderat di sini tidak merujuk pada sikap ragu dan gamang, tetapi lebih pada cara dan pendekatan yang luwes dalam mencari solusi untuk mengatasi perbedaan. Citra muslim moderat itu memungkinkan Indonesia berperan sebagai jembatan bagi dua pihak yang saling menyalahkan. Ketika dunia menatap Islam penuh curiga sebagai biang terorisme, muslim moderat Indonesia menyampaikan pesan pada dunia bahwa masih banyak muslim di Indonesia yang sangat menentang radikalisme agama. Moderasi politik Islam Indonesia seperti inilah yang membuat dunia percaya, Islam Indonesia bukan ancaman. Dengan citra muslim moderat seperti ini pula, Indonesia tidak canggung dalam memainkan kiat-kiat diplomasinya melalui serangkaian *interfaith dialogue*, sehingga terbentuk saling pengertian antara Barat dan Islam.
3. Citra sebagai negara pluralistik. Jika masyarakat menjunjung tinggi demokrasi, ia akan menjauhi sikap radikal dan menonjolkan sikap moderat.

Jika sudah moderat, ia akan menghargai keberagaman dan perbedaan. Sifat pluralistik yang menghargai kebinekaan merupakan resultan dari karakter demokratis dan moderat suatu bangsa. Di tengah kecenderungan bangsa-bangsa Eropa yang menunjukkan sikap *anti-migrant*, dan munculnya pertentangan antar-etnik di Malaysia, Indonesia justru mengusung citra pluralistik dalam polugri (politik Luar Negeri) dan diplomasinya. Polugri yang berwatak pluralistik mengedepankan diplomasi yang mencitrakan Indonesia yang menghargai keberagaman, antara lain melalui diplomasi kebudayaan yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia di luar negeri.

Diplomasi pencitraan dengan tiga ciri itu –demokratis, moderat, dan pluralistik– tidak bergerak dalam ruang kosong dan vakum nilai. Ketiga citra itu dikembangkan justru di tengah masyarakat yang sedang bertransformasi menjadi lebih transparan dan partisipatif, buah demokrasi itu sendiri. Fareed Zakaria dalam bukunya, *The Future of Freedom* (2003), mengingatkan bahwa ada dua implikasi yang ditimbulkan gelombang demokratisasi, yaitu berubahnya struktur kekuasaan dan kontrol negara serta merosotnya wibawa negara. (Darmansjah Djumala/2008)

Hal senada di sampaikan oleh Prof Anak Agung Banyu Perwita PhD menekankan, perbaikan domestik, baik di bidang ekonomi, demokrasi dan penghargaan terhadap HAM, sebagai pilar utama dalam mengembangkan diplomasi total atau `multi track diplomacy` di luar negeri. (Suara Karya/2010) Selanjutnya Prof Banyu juga mengatakan dalam era yang telah mengglobal seperti saat ini, terdapat empat D yang harus menjadi perhatian negara secara simultan agar kredibilitas bangsa di fora internasional mumpuni, masing-masing development (pembangunan), democracy (demokrasi), diplomacy (diplomasi) dan defence (pertahanan).

Kesimpulan

Sebagai upaya dalam meningkatkan pencitraan Indonesia di publik international, pemerintah telah melaksanakan berbagai cara salah satunya adalah dengan diplomasi total, diplomasi yang mengerahkan semua komponen positif yang terdapat di Indonesia. Pelaksanaan dipomasi total ini memanfaatkan aset-aset yang di miliki oleh Indonesia seperti pelaksanaan proses demokratisasi , peristiwa yang paling menonjol pada proses demokratisasi adalah keberhasilannya pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai wilayah di Indonesia. Di aspek seni dan budaya baik tradisional maupun kontemporer adalah juga mempunyai peranan yang dapat signifikan dalam upaya terus membangun pencitraan Indonesia. Dengan begitu rasanya tidak akan menjadi beban berat lagi bagi pemerintah untuk melaksanakan pencitraan Indonesia agar

eksistensinya dapat di terima di dunia Inetrnational karena diplomasi total telah menjadi tugas dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Kikoo, 2009; Pendapat tentang Diplomasi
- Hasan Wirayuda, 2009; Naskah pidato pada Pertemuan Publik Relations
- Vivi Feriany, 2009; Memperkuat Diplomasi Pencitraan Indonesia,2009
- Darmansjah Djumala, Diplomat Indonesia, bertugas di Jakarta Kolom, *Gatra* Nomor 31 Beredar Kamis, 12 Juni 2008
- Prof. Dr .Boer Mauna, 2002; Diplomasi dan Hukum Diplomatik.
- Suara karya edisi 2010